

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN
EKONOMI DESA
(STUDI KASUS BUMDES DI KECAMATAN NGANCAR
KABUPATEN KEDIRI)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Amalia Indah Palupi
165020100111010**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa

(Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Amalia Indah Palupi

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Brawijaya

amaliaindah@student.ub.ac.id

Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan BUMDes dalam menunjang pembangunan ekonomi desa, dengan studi kasus BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan informan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Pengurus BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya Mandiri, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan kuisioner dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan pada masing-masing BUMDes telah didapatkan karakteristik pengelolaan yang berbeda dalam implementasi indikator prioritas. BUMDes di Kecamatan Ngancar mendapat peran fasilitator dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD). Eksistensi BUMDes juga berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: Pengelolaan BUMDes, Analytical Hierarchy Process (AHP), Kinerja BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Desa.

PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempermudah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas (nasional) ataupun oleh masyarakat yang lebih kecil atau terbatas (lokal) (Rahardjo Adisasmita, 2005:16). Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Pasal 1 Ayat 24, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa).

Jumlah desa yang ada di Jawa Timur adalah 7.724 desa, dan sejumlah 5.432 desa yang saat ini telah membentuk BUMDes. Dari angka tersebut, yang dinilai sudah berkembang dan maju mencapai 413 desa (sumber: Kominfo Jatim Prov, DPMPD, 2019). Dalam upaya memajukan keberadaan BUMDes ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Pemerintahan Desa. Perkembangan BUMDes di Kediri terus mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data BUMDes Kediri Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Desa	Jml. Desa yang membentuk BUMDes	Jml.Desanya yang belum membentuk BUMDes	Jml. Unit Usaha BUMDes	Jml. Usaha BUMDes aktif	Jml. Usaha BUMDes tidak aktif
2017	343	284	59	128	68	60
2018	342	290	52	168	121	47
2019	343	304	39	170	125	45

(Sumber: DPMPD, diolah 2020)

Kecamatan Ngancar terletak di Kabupaten Kediri, secara administratif memiliki 10 desa, yaitu Desa Bedali, Desa Margourip, Desa Manggis, Desa Sempu, Desa Sugihwaras, Desa Ngancar, Desa Pandantoyo, Desa Kunjang, Desa Jagul dan Desa Babadan. Dari sepuluh desa tersebut hanya satu desa saja yang belum membentuk Badan Usaha Milik Desa, yaitu Desa Sugihwaras yang terletak di lereng Gunung Kelud. Dalam implementasinya, BUMDes diharapkan mampu memberikan deviden kepada Pemerintahan Desa, dimana berdasarkan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2017 menyatakan bahwa keuntungan 30% dari BUMDes akan dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pengelolaan unit usaha BUMDes pada sembilan desa di Kecamatan Ngancar yang masih berkembang saat ini berupa Prukades, diantaranya adalah olahan nanas, agro buah, penggemukan sapi, perdagangan, pengelolaan air bersih, kerajinan aluminium, paket wisata, desa wisata, persewaan kios, agen BNI 46, supliyer sembako dan kantor POS desa. Adapun potensi wisata saat ini menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi pada beberapa desa di Kecamatan Ngancar. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana proses berjalannya BUMDes di Kecamatan Ngancar selama ini, maka penulis meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa?
2. Apa saja permasalahan pada pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa?
3. Bagaimana pemberdayaan sumberdaya lokal desa-desa di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pada pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan sumberdaya lokal desa-desa di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Desa di Era Otonomi Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merumuskan bahwa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengenai hal keuangan, desa memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu berupa segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dalam APBDesa seluruhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa sesuai dengan peraturan bupati/walikota. Dana desa sebesar 30% dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam belanja pemberdayaan masyarakat salah satunya digunakan untuk Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 1 angka 6 UU No.6 Tahun 2016 tentang BUMDes, sebagai Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat musyawarah dilaksanakan oleh BPD, Pemerintah Desa, beserta anggota atau masyarakat yang tergabung dalam BUMDes.

Tujuan Pembentukan BUMDes, yaitu: Meningkatkan perekonomian Desa; Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; Membuka lapangan kerja; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes, yang pertama adalah *Kooperatif*, dimana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kedua adalah *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha. Ketiga adalah *Emansipatif*, dimana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Keempat adalah *Transparan*, dimana aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Yang kelima adalah *Akuntabel*, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Dan yang terakhir adalah *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Herry Kamaroesid, 2016: 20).

Pembangunan Ekonomi

Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan teknologi produksi, sikap masyarakat, dan kelembagaan. Perubahan ini kemudian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi menurut Todaro, M P & Smith

Menurut Todaro & Smith, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3)

Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola seluruh sumber daya yang tersedia dan membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Lincolin Arsyad (2015:374), dalam upaya pembangunan ekonomi daerah terdapat tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mampu bersinergi untuk mengambil inisiatif guna mewujudkan pembangunan daerah.

Pembangunan Pedesaan

Pembangunan hendaknya diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat (Soedjatmoko, 1984; 19). Sehingga pembangunan pedesaan dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kerangka Pikir

Implementasi BUMDes tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator pelaksanaan program BUMDes. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) untuk melaksanakan programnya dalam mendukung implementasi BUMDes di Kabupaten Kediri. Eksistensi BUMDes dapat dilihat dari bagaimana program yang dirumuskan dan bagaimana implementasinya. Dengan melihat Jenis Usaha bersamaan dengan Pemberdayaan Masyarakatnya dan bagaimana BUMDes dalam melakukan Pengelolaan Usaha inilah yang nantinya akan menentukan Keberhasilan BUMDes itu sendiri. Sehingga dapat dilihat hasilnya apakah dari seluruh program yang dilaksanakan telah mampu menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan fakta dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan BUMDes dalam menunjang pembangunan ekonomi desa-desa di Kecamatan Ngancar. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), AHP dikembangkan oleh Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalkan ke dalam suatu proses sistematis.

Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Ngancar terletak pada lereng dan puncak Gunung Kelud yang merupakan kawasan wisata andalan Kabupaten Kediri. Sehingga pada wilayah ini memiliki peluang besar untuk mengeksplorasi potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian desa, yang salah satunya yaitu melalui BUMDes. Penelitian yang dilaksanakan di sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes yang masih dalam klasifikasi dasar, tumbuh, dan berkembang. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan apakah sudah terdapat solusi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Desa, memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Jumlah Sample Berdasarkan Jenis *Stakeholder*

No.	<i>Stakeholder</i>	Responden
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)	1
2	Pengurus BUMDes	9
3	Masyarakat/ Pengusaha	9
Jumlah		19

Prosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel atau responden yang dianggap dapat mewakili segmen *stakeholder* yang dinilai mempunyai pengaruh atau merasakan dampak besar terkait eksistensi BUMDes di wilayah mereka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah memberikan daftar kuisioner untuk Pengurus BUMDes yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dan teknik wawancara dilakukan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sampel, dalam hal ini adalah masyarakat yang bekerjasama dengan BUMDes sehingga mereka merasakan dampak langsung terkait keberadaan BUMDes di desa mereka.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan Bumdes dalam menunjang pembangunan ekonomi desa meliputi analisis Kualitatif Deskriptif dan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Tabel Penjelasan Hierarki

Kriteria		Sub Kriteria	Alternatif (BUMDes)
A. Kooperatif	A1	Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap	• Sempu Mandiri • Toyo Makmur • Margo Jaya • Maju Makmur • Guyub Rukun • Sumber Makmur
	A2	Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa	
	A3	Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes	
	A4	Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes	
	A5	Unit Usaha BUMDes berbadan hukum	
B. Partisipatif	B1	Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga	
	B2	Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes	
	B3	Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha	
	B4	Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada masyarakat	
	B5	BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat	
C. Emansipatif	C1	Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan presentase penyertaan modal	
	C2	Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	
	C3	Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan	

		untuk Pendapatan Asli Desa (PADes)	• Sumber Agung • Lancar Sejahtera • Karya Mandiri.
	C4	BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan calon investor	
	C5	BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha	
D. Transparan	D1	BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan	
	D2	Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes	
	D3	BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan informasi lainnya melalui papan informasi atau menyampaikan secara langsung kepada Penasehat BUMDes	
	D4	BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat	
	D5	Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang mempengaruhi berjalannya BUMDes	
E. Akuntabel	E1	Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit	
	E2	Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan	
	E3	BUMDes memiliki rekening bersama	
	E4	Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes	
	E5	Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin	
F. Sustainable	F1	Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa	
	F2	Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar	
	F3	Keberlanjutan <i>supply</i> produksi	
	F4	Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi pasar	
	F5	Manfaat dari BUMDes diperluas (<i>expanded benefits</i>)	

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Wilayah

Kecamatan Ngancar merupakan kecamatan yang semua desanya terletak di dataran dan lereng Gunung Kelud. Sehingga sepuluh desa di Kecamatan Ngancar memiliki banyak potensi mulai dari perkebunan, pertanian, hingga wisata alam. Oleh karena itu terdapat BUMDes pada masing-masing desa yang bertugas untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi lokal desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan hasil studi literatur dan pencarian fakta-fakta implementasi dilapangan, maka dalam penelitian ini mendasarkan pada enam prinsip atau kriteria dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Keenam kriteria tersebut yaitu kriteria Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable. Masing-masing kriteria tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data terkait Badan Usaha Milik Desa di Kediri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yang lebih khususnya dari bidang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Selanjutnya penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengelolaan BUMDes lebih dalam, penulis melakukan wawancara kepada pengurus BUMDes. Adapun dalam penelitian ini penulis melihat tanggapan dari sisi masyarakat yang berhubungan langsung dengan Unit Usaha yang dimiliki oleh BUMDes, penulis melakukan wawancara dengan pemilik atau pengelola salah satu unit usaha dalam BUMDes.

Analisis Indikator Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)

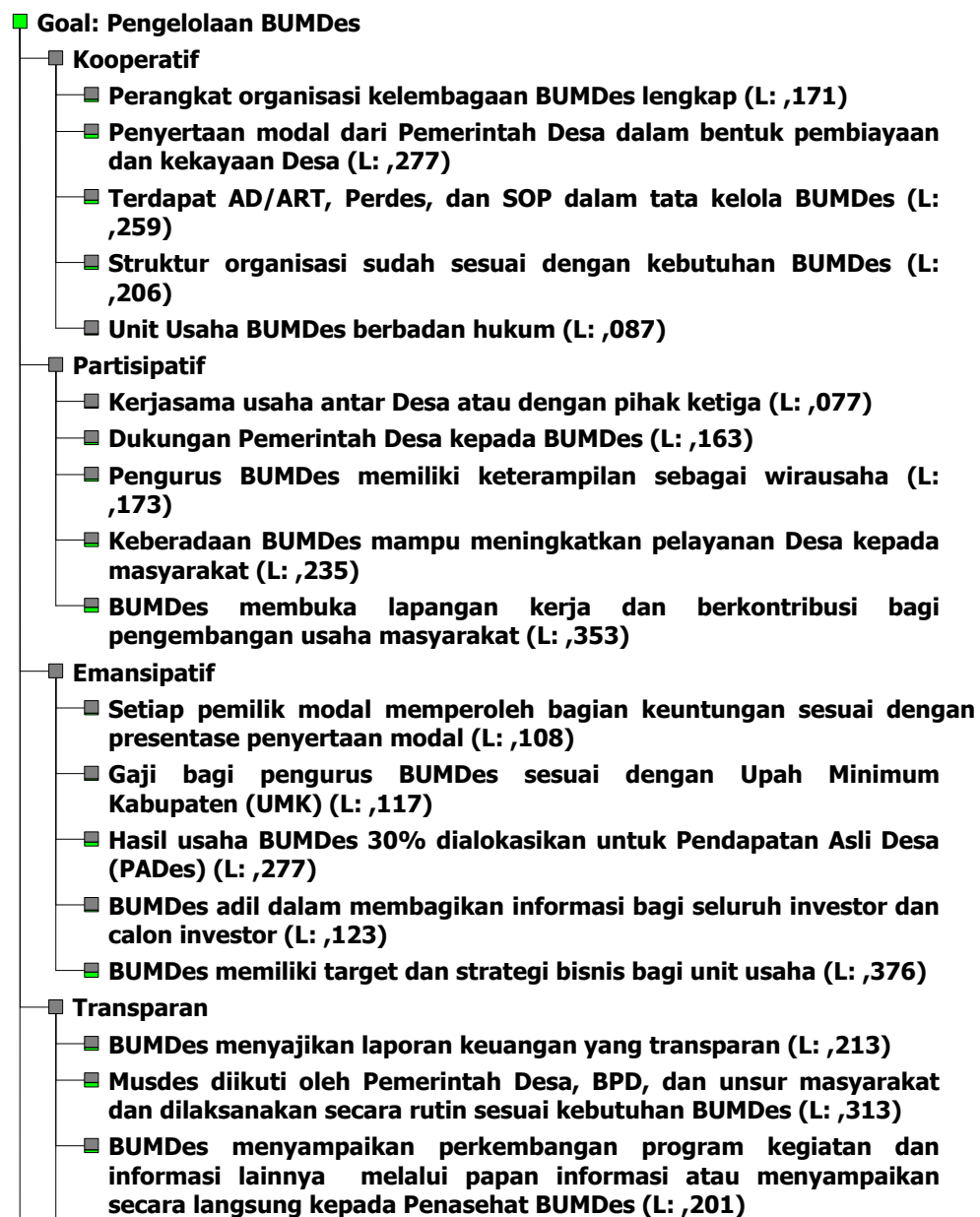
Pembobotan dan Pemingkatan Prinsip Pengelolaan BUMDes merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi keberhasilan pengelolaan BUMDes. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-indikator pembentuk pengelolaan tersebut rendah, maka keberhasilan pengelolaan BUMDes tersebut juga rendah. Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan Software yaitu Expert Choice. Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang sebaiknya diprioritaskan dan memberikan pengaruh bagi peningkatan pengelolaan BUMDes. Nilai pembobotan diperoleh dari hasil wawancara dan memberikan

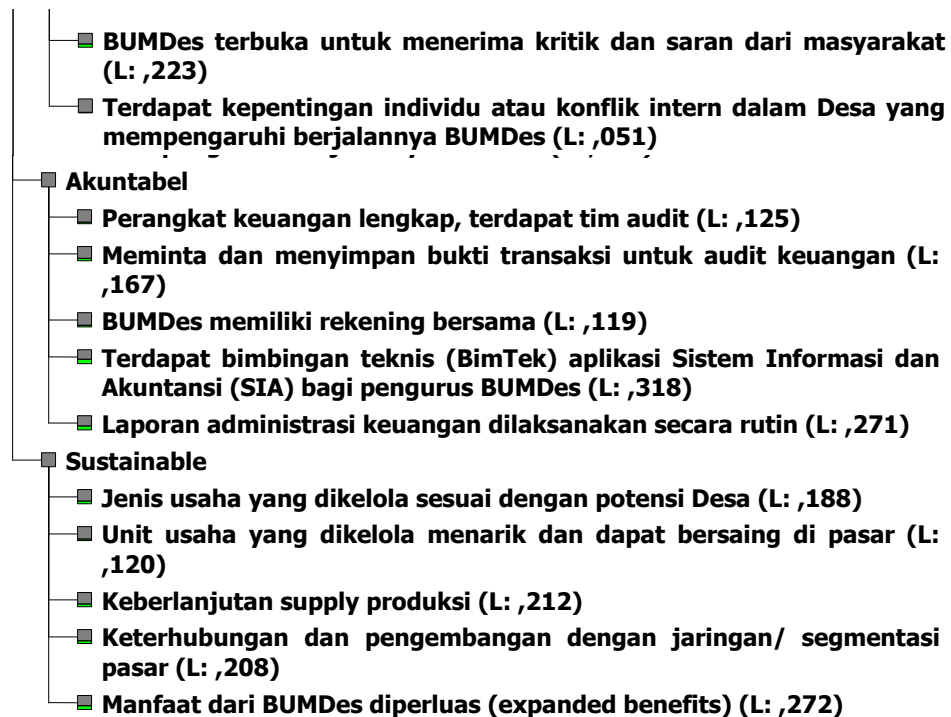
kuisioner kepada pengurus BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya Mandiri.

Faktor Prioritas Dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Ngancar

Berikut ini merupakan hasil pembobotan dari faktor-faktor pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Ngancar dengan menggunakan Expert Choice, hasil ini didapatkan dengan menggabungkan sembilan responden yang merupakan perwakilan dari masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Indikator Kinerja Pengelolaan BUMDes





Berdasarkan hasil dari penghitungan diatas menunjukkan bahwa pada masing-masing kriteria terdapat satu sub kriteria yang menurut pengurus BUMDes faktor tersebut merupakan yang paling penting jika dibandingkan faktor lain yang mendukung pengelolaan BUMDes pada Desa mereka. Dapat kita lihat pada indikator Kooperatif telah didapatkan bahwa faktor *Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa* memiliki bobot paling besar yaitu 0,277. Kemudian pada indikator Partisipatif telah didapatkan bahwa faktor *BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat* memiliki bobot paling besar yaitu 0,353. Sedangkan pada indikator Emansipatif telah didapatkan bahwa faktor *BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha* memiliki bobot paling besar yaitu 0,376. Selanjutnya pada indikator Transparan telah didapatkan bahwa faktor *Musyawarah Desa (Musdes) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes* memiliki bobot paling besar yaitu 0,313. Pada indikator Akuntabel telah didapatkan bahwa faktor *Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes* memiliki bobot paling besar yaitu 0,318. Dan yang terakhir pada indikator Sustainable telah didapatkan bahwa faktor *Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits)* memiliki bobot paling besar yaitu 0,272.

Selanjutnya terdapat penjelasan faktor-faktor keberhasilan pengelolaan BUMDes berdasarkan hasil pembobotan dan pemeringkatan menggunakan Analitic Hierarchy Process (AHP) pada masing-masing indikator, yang didapatkan dengan menggabungkan sembilan responden yang merupakan perwakilan dari masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

A. Indikator Kooperatif

Goal: Pengelolaan BUMDes >Kooperatif	Priorities with respect to:	Co..
Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap		,171
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa		,277
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes		,259
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes		,206
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum		,087
Inconsistency = 0,03 with 0 missing judgments.		

B. Indikator Partisipatif

Goal: Pengelolaan BUMDes >Partisipatif	Priorities with respect to:	..
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga		,077
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes		,163
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha		,173
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada masyarakat		,235
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat		,353
Inconsistency = 0,02 with 0 missing judgments.		

C. Indikator Emansipatif

Goal: Pengelolaan BUMDes >Emansipatif	Priorities with respect to:	Combined
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan presentase penyertaan		,108
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)		,117
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes)		,277
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan calon investor		,123
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha		,376
Inconsistency = 0,02 with 0 missing judgments.		

D. Indikator Transparan

Goal: Pengelolaan BUMDes >Transparan	Priorities with respect to:	Combined
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan		,213
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara terbuka		,313
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan informasi lainnya melalui media sosial		,201
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat		,223
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang mempengaruhi BUMDes		,051
Inconsistency = 0,04 with 0 missing judgments.		

E. Indikator Akuntabel

Priorities with respect to:		Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes >Akuntabel		
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit	,125	
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan	,167	
BUMDes memiliki rekening bersama	,119	
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) ba	,318	
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin	,271	
Inconsistency = 0,02 with 0 missing judgments.		

F. Indikator Sustainable

Priorities with respect to:		Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes >Sustainable		
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa	,188	
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar	,120	
Keberlanjutan supply produksi	,212	
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi pasar	,208	
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits)	,272	
Inconsistency = 0,03 with 0 missing judgments.		

Dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat diterima karena nilai Inconsistency rasio kurang dari 0,1.

Pengelolaan BUMDes dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi

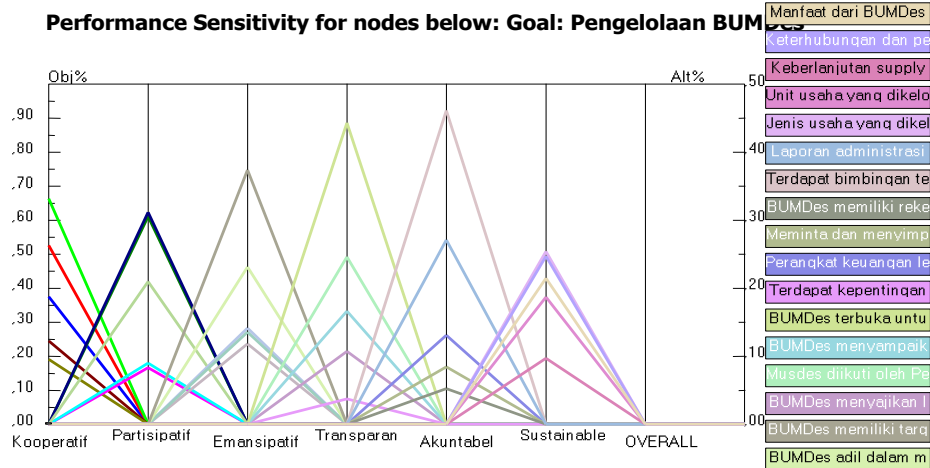
Pembentukan kelembagaan dalam desa berupa organisasi BUMDes berperan sebagai wadah untuk mengorganisir masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi bersama. Dengan adanya analisis faktor prioritas dalam penjelasan diatas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan dalam BUMDes telah selaras dengan konsep baru pembangunan ekonomi yaitu “pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru”. Dan upaya peningkatan kapasitas lembaga lokal tersebut merupakan salah satu proses pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi pengelolaan BUMDes benar adanya apabila disandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi dengan melihat aspek kelembagaan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tercapainya suatu pembangunan ekonomi.

Indikator Prioritas dalam Pengelolaan pada Masing-masing BUMDes

Unit usaha yang dimiliki oleh masing-masing BUMDes sangat beragam, disesuaikan dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) pada masing-masing Desa. Dengan terdapatnya perbedaan latar belakang baik dari segi

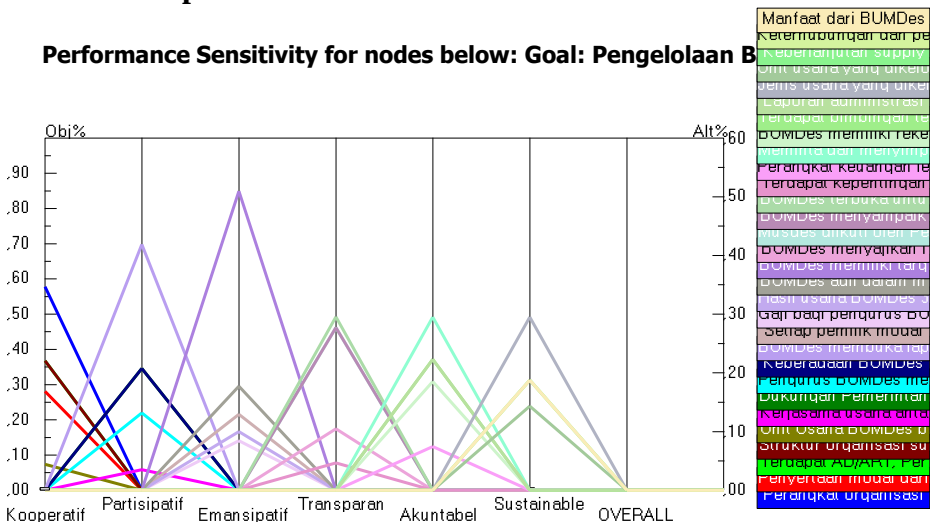
potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola maupun dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola, maka setiap desa memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pengelolaan BUMDes pada Desa mereka. Maka dalam penelitian BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berikut, telah didapatkan sebuah hasil bahwa pada masing-masing BUMDes memiliki Indikator Prioritas yang berbeda. Berikut merupakan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) dari sembilan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

1. BUMDes Maju Makmur



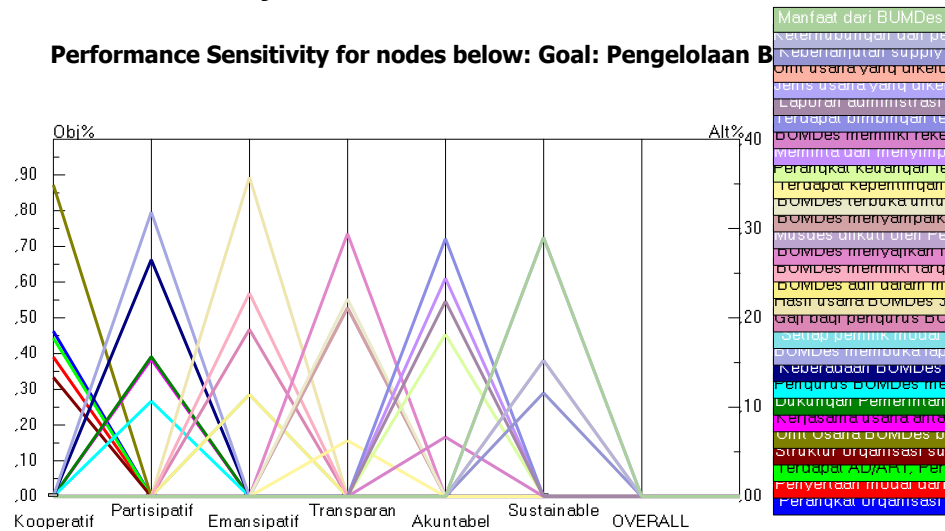
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Maju Makmur lebih memprioritaskan indikator Akuntabel, yaitu *Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes* dengan bobot sebesar 0,461. Namun ternyata dengan prioritas tersebut masih belum sesuai dengan hasil kinerja BUMDes di bidang keuangan. Dimana BUMDes belum mampu memberikan dividen kepada Pemerintah Desa. Sehingga dengan hasil penghitungan ini dapat diketahui bahwa BUMDes Maju Makmur membutuhkan Bimbingan teknis terkait sistem informasi dan akuntansi agar kegiatan keuangan unit usaha dapat tercatat dengan baik sehingga dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Desa.

2. BUMDes Sempu Mandiri



4. BUMDes Lancar Sejahtera

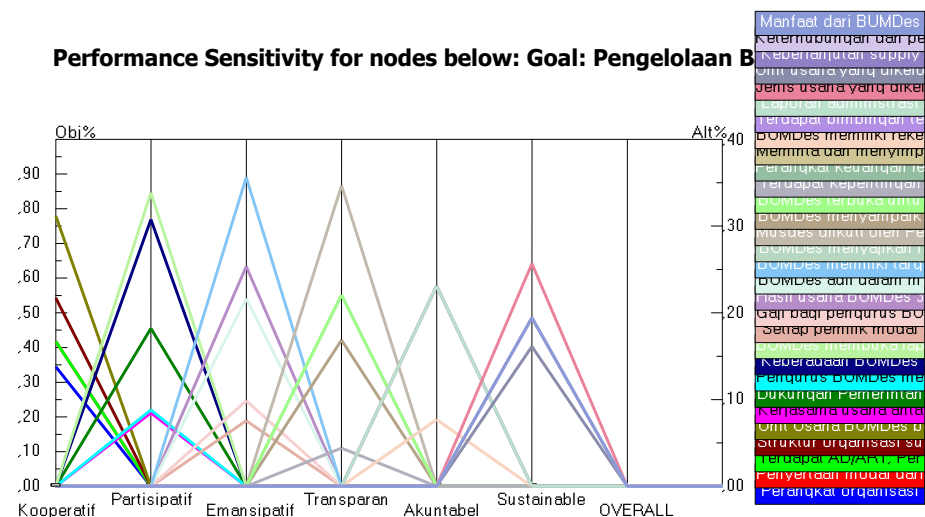
Performance Sensitivity for nodes below: Goal: Pengelolaan BUMDes



Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Lancar Sejahtera memprioritaskan indikator *Hasil usaha BUMDes dialokasikan 30% untuk pendapatan asli desa (PADes)* dengan nilai sebesar 0,357. Namun pemilihan prioritas tersebut belum sesuai dengan hasil kinerja BUMDes. Sebab dengan unit usaha air bersih tersebut, untuk saat ini BUMDes masih belum memberikan kontribusi terhadap PADes, karena laba yang didapatkan digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal dan untuk perluasan jaringan pipa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prioritas tersebut masih belum dapat dicapai oleh BUMDes Lancar Sejahtera.

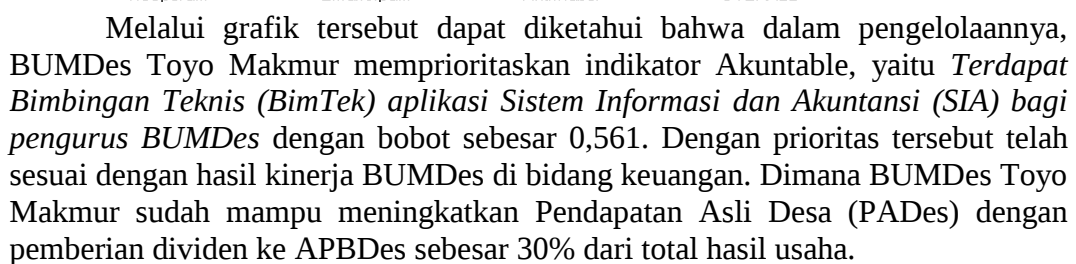
5. BUMDes Guyub Rukun

Performance Sensitivity for nodes below: Goal: Pengelolaan BUMDes



Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Guyub Rukun memprioritaskan indikator *BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha*, dengan nilai sebesar 0,356. Pemilihan prioritas dalam pengelolaan ini masih belum sejalan dengan hasil kinerja BUMDes, dengan memfokuskan unit usaha peternakan, kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh

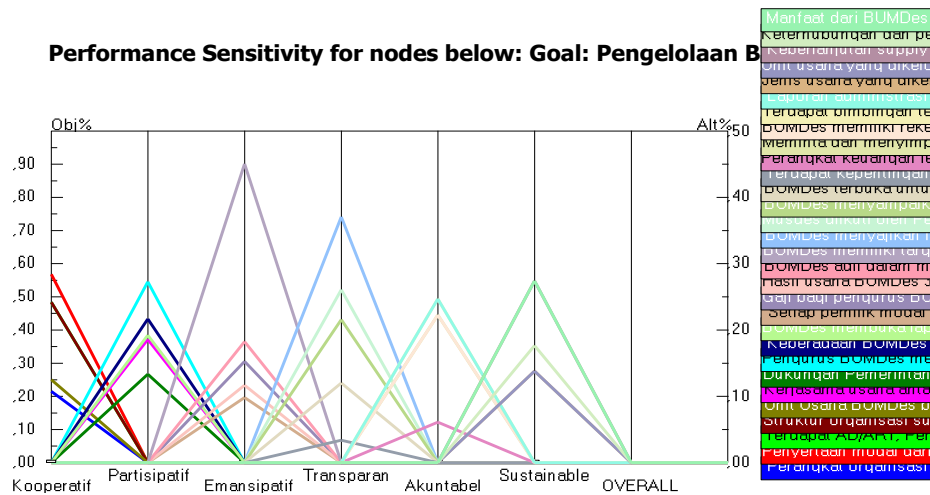
6. BUMDes Toyo Makmur

[illegible]

Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Margo Jaya memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu *Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha*, dengan nilai sebesar 0,523. Saat ini BUMDes Margo Jaya memiliki empat unit usaha dan bekerja sama

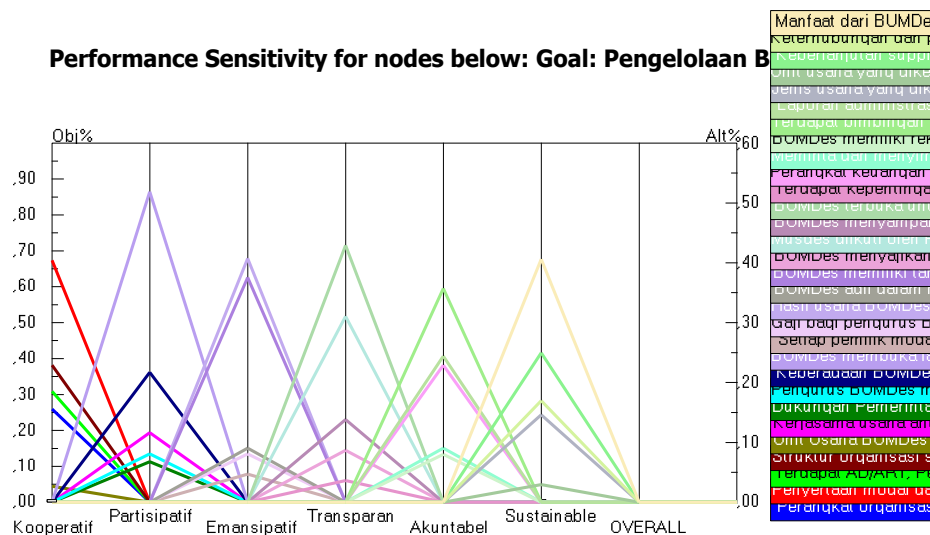
dengan UMKM warga sekitar, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan kinerja BUMDes yang saat ini sedang menghimpun beberapa unit usaha dan UMKM.

8. BUMDes Abdi Sukses Mandiri



Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Abdi Sukses Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif, yaitu *BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha*, dengan nilai sebesar 0,450. Hal tersebut telah sesuai dengan kinerja BUMDes. Dimana dalam pelaksanaannya BUMDes Abdi Sukses Mandiri memiliki satu unit usaha yaitu pengelolaan air bersih, dan target unit usahanya adalah masyarakat desa dan para peternak yang membutuhkan banyak air untuk kegiatan operasional peternakan di Desa Ngancar tersebut.

9. BUMDes Sumber Makmur



Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, BUMDes Sumber Makmur memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu *BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat*, dengan nilai sebesar 0,519. Dalam implementasinya BUMDes Sumber Makmur telah membuka unit usaha baru yaitu sayur hidroponik, dimana

terdapat salah satu mitra yaitu Bapak Slamet yang sebelumnya sudah memiliki usaha hidroponik sendiri, dan kemudian Bapak Slamet bergabung dengan BUMDes sehingga usahanya dapat lebih berkembang. Sehingga hasil penghitungan AHP pada indikator pengelolaan ini telah sesuai dengan implementasi BUMDes dilapangan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes

Program Dana Desa oleh Kementerian Pedesaan salah satunya dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini pada hampir seluruh Desa di Kediri sudah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, berikut merupakan data penyertaan modal pada sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar.

Data Penyertaan Modal BUMDes 2017-2019

No.	Desa	Penyertaan Modal Dana Desa (Rp)			TOTAL
		2017	2018	2019	
1	Sempu	-	100.000.000	150.000.000	250.000.000
2	Pandantoyo	42.000.000	136.640.000	229.991.525	408.631.525
3	Margourip	62.000.000	50.000.000	17.600.000	129.600.000
4	Bedali	-	35.000.000	50.000.000	85.000.000
5	Kunjang	-	100.000.000	300.000.000	400.000.000
6	Manggis	-	100.000.000	16.200.000	116.200.000
7	Ngancar	-	-	-	-
8	Sugihwaras	-	30.000.000	-	30.000.000
9	Babadan	-	100.000.000	-	100.000.000
10	Jagul	-	50.000.000	20.000.000	70.000.000

(Sumber: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) DPMPD Kab Kediri, 2019)

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh desa terhadap potensi yang mereka miliki, maka eksistensi BUMDes di Kediri terus mengalami pertumbuhan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Data BUMDes Kediri Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Desa	Jml. Desa yang membentuk BUMDes	Jml.Desanya belum membentuk BUMDes	Jml. Unit Usaha BUMDes	Jml. Usaha BUMDes aktif	Jml. Usaha BUMDes tidak aktif
2017	343	284	59	128	68	60
2018	342	290	52	168	121	47
2019	343	304	39	170	125	45

(Sumber: DPMPD, diolah 2020)

Dengan data BUMDes tersebut, maka melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) DPMPD, terdapat klasifikasi untuk mengidentifikasi kebutuhan BUMDes berdasarkan tahapan yang dimiliki oleh masing-masing BUMDes. Terdapat empat klasifikasi BUMDes yaitu tahap dasar, berkembang, tumbuh, dan maju.

Penilaian Klasifikasi BUMDes Ngancar

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes			
				Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Sempu	SEMPU MANDIRI	7.5		✓		
2	Pendantoyo	TOYO MAKMUR	7		✓		
3	Margourip	MARGO JAYA	8			✓	
4	Bedali	MAJU MAKMUR	7		✓		
5	Kunjang	GUYUB RUKUN	7		✓		
6	Manggis	SUMBER MAKMUR	6	✓			
7	Ngancar	SUMBER AGUNG	7.5		✓		
8	Sugihwaras	-	-	-	-	-	-
9	Babadan	LANCAR SEJAHTERA	7.5		✓		
10	Jagul	KARYA MANDIRI	6	✓			

(Sumber: DPMPD, 2019)

Kinerja BUMDes Dalam Mengelola Unit Usaha

Kinerja Pengurus BUMDes menjadi salah satu faktor keberhasilan terhadap pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan program yang ada. Pengurus BUMDes harus memiliki inovasi dan kesadaran akan potensi desa mereka. Hal lain yang penting bagi aspek kinerja ini adalah sumber daya manusia, standard operasional prosedur (SOP), dan kondisi finansial dalam internal BUMDes itu sendiri. Selain itu penataan manajemen yang baik, pengelolaan asset, tertib administrasi, dan pelaporan keuangan yang baik juga dapat mendukung profesionalitas dalam BUMDes. Berikut merupakan tabel Peninjauan Kinerja BUMDes di Kecamatan Ngancar.

Tabel 4.4 Peninjauan Kinerja BUMDes di Kecamatan Ngancar

Desa	BUMDes	Unit Usaha	Pihak Ketiga	Jml. Tenaga Kerja	Total Penyerataan Modal (2017-2019)	Total Pendapatan (2019)	Hasil Usaha (2019)	Dividen ke APBDes (PADES 2019)	
								Jumlah	Keterangan
Sempu	SEMPU MANDIRI	Olahan Nanas Paket Wisata Supliyer Sembako Agen BNI 46	Kampung Indian Kampung Angrek E-Warung BNI	22	250.000.000	180.000.000	20.000.000	-	**
Pandantoyo	TOYO MAKMUR	Agro Buah Wisata	*	20	408.631.525	95.222.500	38.529.800	1.350.000	**
Margourip	MARGO JAYA	Penggemukan Sapi Persewaan Kios Kantor POS Desa Agen BNI 46	BNI Kantor POS UMKM	11	129.600.000	-	-	-	**
Bedali	MAJU MAKMUR	Olahan Nanas	TKM Dahlia Petani Nanas	11	85.000.000	77.865.985	-	-	**
Kunjang	GUYUB RUKUN	Perdagangan Penggemukan Sapi Agen BNI 46	BNI	10	400.000.000	612.752.250	23.275.990	6.982.797	30% dari hasil usaha
Manggis	SUMBER MAKMUR	Penggemukan Sapi Pertokoan Hidroponik	*	9	116.200.000	-	-	-	**
Ngancar	ABDI SUKSES MANDIRI	Pengelolaan Air Bersih	*	6	Tidak dianggarkan	186.215.000	77.199.989	-	**
Sugihwaras	KELUD MANDIRI	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-
Babadan	LANCAR SEJAHTERA	Pengelolaan Air Bersih	*	8	100.000.000	181.825.500	-	-	**
Jagul	KARYA MANDIRI	Kerajinan Aluminium	*	9	70.000.000	21.210.000	4.269.000	1.280.700	30% dari hasil usaha

Keterangan:

(-) = Data tidak dapat diakses.

(*) = Belum bekerjasama dengan pihak ketiga.

(**)= Pendapatan masih digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal unit usaha.

Permasalahan dan Kendala dalam Pengelolaan BUMDes

Permasalahan dalam implementasi BUMDes dapat memengaruhi keberhasilan dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar. Dimana dalam pelaksanaannya BUMDes memiliki permasalahan, diantaranya: 1) BUMDes belum memiliki jenis kegiatan usaha yang pas; 2) Kapasitas pengurus Bumdes masih lemah; 3) Tidak semua pengurus BUMDes memiliki jiwa kewirausahaan dan pengalaman usaha yang telah teruji; dan 4) Geliat perkembangan BUMDes masih belum terwujud.

Adapun kendala lain yaitu Belum adanya pemahaman utuh bahwa Bumdes menjadi induk semua kegiatan usaha desa (Permendes no 4 th 2015 pasal 2 dan perda no 7 tahun 2017 pasal 3) bahwa pendirian/pengaturan BUMDes untuk menampung seluruh kegiatan usaha desa. Usaha BUMDes belum seluruhnya menarik dan belum memiliki jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Kendala lainnya yaitu masih belum meratanya informasi mengenai keberadaan BUMDes kepada masyarakat desa, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum paham terkait manfaat dari adanya BUMDes bagi mereka.

Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh BUMDes

Mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang merasakan dampak dari adanya BUMDes di desa mereka. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian desa atas potensi yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Ngancar belum seluruhnya unit usaha mereka sesuai dengan potensi lokal desa. Selain itu dengan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam BUMDes, telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa di Kecamatan Ngancar.

Berikut merupakan tabel data yang berasal dari sisi masyarakat desa yang merasakan langsung manfaat dari adanya BUMDes di desa mereka. Yaitu berisi data mengenai BUMDes, nama yang bersangkutan, pekerjaan sebelumnya, jenis unit usaha yang dikelola, fasilitas dari BUMDes, Kendala yang dihadapi, dan pendapat mereka mengenai potensi desa yang masih belum dikembangkan.

Tabel 4.5 Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDes

BUMDes	Nama	Pekerjaan Sebelumnya	Unit Usaha	Fasilitas dari BUMDes	Kendala	Potensi Desa yang Belum Dikembangkan
SEMPU MANDIRI	Edi Sutrisno	Petani Nanas	Olahan sari buah nanas	Permodalan budidaya nanas Alat produksi sari nanas	Serangan hama, Persaingan pasar, Keterbatasan alat	Desa wisata (aspek budaya dan kesenian kuda lumping)
TOYO MAKMUR	Utami	Ibu rumah tangga	Pembibitan dan Toko peracangan	Akses pinjaman modal Lapak kios	Sepi karena pandemi covid	Olahan pertanian (produk turunan buah dan sayur)
MARGO JAYA	Gayatri	Ibu rumah tangga	Pertokoan	Bangunan pertokoan	Belum ada kendala yang berarti	Olahan sari buah nanas
MAJU MAKMUR	Ahmad Khoirul Anam	Karyawan swasta	Pertanian	Alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor	Serangan hama, Kapasitas pengelola belum ahli	Supply komoditas beras
GUYUB RUKUN	Yeni	Ibu rumah tangga	Pertokoan, pembayaran PLN, PDAM, PBB, PKB, BPJS, dll.	Bangunan Kios	Belum ada kendala yang berarti	Olahan sari buah nanas
SUMBER MAKMUR	Slamet Widodo	Pengusaha hidroponik	Hidroponik	Greenhouse, instalasi hidroponik, benih, nutrisi, dan media tanam	Hama tanaman, Kurangnya tenaga kerja untuk pemasaran sayur	Pasar desa dan penarikan listrik desa
ABDI SUKSES MANDIRI	Dwi Sekti Utomo	Karyawan swasta	Air Bersih	Pompa stabiliser, jaringan pipa, bangunan, gudang, dan dua unit sumur bor	Permasalahan teknis pengambilan tujuh pipa yang terputus didalam sumur bor	Desa wisata petik nanas
LANCAR SEJAHTERA	Luluk	Buruh tani	Air Bersih	Sumur bor, instalasi, dan jaringan pipa	Membutuhkan pembaruan meteran air yang berusia > 10 tahun pada rumah warga	Pengolahan buah nanas
KARYA MANDIRI	Beni	Pengusaha etalase	Kerajinan Aluminium	Permodalan, Alat produksi	Masih kesulitan dalam pembukuan keuangan	Budidaya benih tanaman

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berfokus pada enam indikator dan tiga puluh kriteria pengelolaan BUMDes, telah didapatkan enam faktor yang dianggap paling penting oleh pengurus BUMDes secara akumulatif pada sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar. Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), didapatkan faktor yang dianggap paling penting adalah: 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa; 2) BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat; 3) BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha; 4) Musyawarah Desa (Musdes) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes; 5) Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes; dan yang terakhir adalah 6) Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits).

Sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) pada masing-masing BUMDes telah didapatkan karakteristik pengelolaan yang berbeda, dimana pada BUMDes Maju Makmur lebih memprioritaskan indikator Akuntabel, yaitu Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes. BUMDes Sempu Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif yaitu BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha. BUMDes Karya Mandiri memprioritaskan indikator Sustainable yaitu Manfaat dari BUMDes diperluas. Pemilihan prioritas dalam BUMDes Lancar Sejahtera memprioritaskan indikator Hasil usaha BUMDes dialokasikan 30% untuk pendapatan asli desa (PADes). BUMDes Guyub Rukun memprioritaskan indikator BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha. BUMDes Toyo Makmur memprioritaskan indikator Akuntabel, yaitu Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes. BUMDes Margo Jaya memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha. BUMDes Abdi Sukses Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif, yaitu BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha. BUMDes Sumber Makmur memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat.

Dalam implementasinya BUMDes di Kecamatan Ngancar mendapat peran fasilitator dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD). BUMDes juga mendapatkan anggaran dari Dana Desa oleh Kementerian Pedesaan yang bersumber dari APBN. Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes di Kecamatan Ngancar telah mampu menyerap tenaga kerja mulai dari sejumlah 6 hingga 22 karyawan pada setiap BUMDesnya. Dalam penelitian ini masing-masing BUMDes memiliki unit usaha yang berbeda sesuai dengan potensi desa dan kapasitas warga setempat, dalam pemilihan jenis unit usaha BUMDes menyesuaikan dengan Produk Unggulan Pedesaan (Prudes). Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pada BUMDes Sempu Mandiri memiliki prudes olahan nanas, BUMDes Toyo Makmur memiliki prudes agro buah dan wisata, BUMDes Margo Jaya memiliki prudes penggemukan sapi, BUMDes Maju Makmur memiliki prudes olahan nanas, BUMDes Guyub Rukun memiliki prudes penggemukan sapi, BUMDes Sumber Makmur memiliki prudes

penggemukan sapi dan hidroponik, BUMDes Abdi Sukses Mandiri memiliki prudes air bersih, BUMDes Lancar Sejahtera memiliki prudes air bersih, dan yang terakhir adalah BUMDes Karya Mandiri memiliki prudes kerajinan aluminium. Adapun permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala bagi BUMDes adalah mengenai kapasitas SDM pengurus, kurangnya eksplorasi potensi desa, dan modal untuk pengembangan unit usaha.

Keterbatasan Penelitian

Dalam input data pada model Analytical Hierarchy Process (AHP) ini sangat bergantung pada persepsi atau subyektifitas dari responden. Penelitian ini menganalisis enam indikator pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Setelah dilakukan analisis, masing-masing BUMDes memiliki unit usaha yang berbeda, pengelolaan yang berbeda, dan sedang menghadapi kendala yang berbeda juga. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan kelemahan bahwa sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar dalam pengelolaannya belum seluruhnya berfokus pada enam indikator tersebut.

Keterbatasan penelitian selanjutnya dalam analisis AHP adalah data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner, namun pengisian kuesioner oleh responden tidak 100% konsisten. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap dapat diterima karena pada keenam indikator pengelolaan BUMDes yang merupakan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) memiliki nilai inconsistency ratio kurang dari 0,1.

Saran

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar. Berikut beberapa saran beserta kendala yang dapat penulis identifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) BUMDes Maju Makmur membutuhkan Bimbingan teknis terkait sistem informasi dan akuntansi agar kegiatan keuangan unit usaha dapat tercatat dengan baik sehingga dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Desa;
- 2) BUMDes Sempu Mandiri membutuhkan informasi untuk merencanakan target dan strategi bisnis bagi unit usaha sari buah nanas, karena terdapat persaingan pemasaran produk sari nanas yang kini menjadi kendala bagi BUMDes untuk mengembangkan unit usahanya;
- 3) BUMDes Karya Mandiri menginginkan manfaat BUMDes diperluas bagi masyarakat dengan melalui penambahan unit usaha, karena BUMDes masih belum menyentuh potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Desa Jagul;
- 4) BUMDes Lancar Sejahtera memerlukan anggaran dana tambahan yang dapat digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal serta untuk perluasan jaringan pipa dan penggantian meteran air pada beberapa rumah warga yang usianya (meteran) lebih dari 10 tahun;

- 5) BUMDes Guyub Rukun memerlukan strategi bisnis yang efisien agar penjualan sapi dapat lebih stabil, karena penjualan sapi hanya akan ramai ketika mendekati hari raya Idul 'Adha;
- 6) BUMDes Toyo Makmur memerlukan strategi marketing untuk memperkenalkan agro wisata buah yang masih dalam masa pengembangan kebun hingga saat ini;
- 7) BUMDes Margo Jaya memerlukan peningkatan kapasitas pengelola melalui BIMTEK maupun bimbingan dan dampingan dari pemerintah daerah yang dilaksanakan secara kontinu;
- 8) BUMDes Abdi Sukses Mandiri memerlukan bimbingan dan dampingan bagi peningkatan kapasitas pengurus dan penambahan jumlah pengurus untuk unit usaha air bersih;
- 9) BUMDes Sumber Makmur memerlukan tambahan anggaran dana untuk pengembangan unit usaha Hidroponik yang kini telah dipasarkan ke tiga swalayan di Kediri, sehingga masih dibutuhkan modal yang cukup besar;

Dengan saran dan kendala yang telah diidentifikasi tersebut diharapkan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa ikut mendukung, mendorong dan memfasilitasi pengembangan BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Daftar Pustaka

- A. Rahardjo Adisasmita. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Bondi Arifin a,*, Eko Wicaksono a, Rita Helbra Tenrini a, Irwanda Wisnu Wardhana a, Hadi Setiawan a, Sofia Arie Damayanty a, Akhmad Solikin b, Maman Suhendra b, Acwin Hendra Saputra b, Gede Agus Ariutama b, Praptono Djuned a, Arif Budi Rahman a, Rudi Handoko a. *Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia*. (2020). Polytechnic of State Finance STAN, Ministry of Finance Republic of Indonesia, Indonesia.
- Chintary, Valentine Queen. dan Lestari, Asih Widi. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*
- DR. Puji Handayati, S.E., M.M., Ak. (2009). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Dra. Harmiati, M.Si. Abdul Aziz Zuhakim, S.Sos., M.Si. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*
- Dr. Herry Kamaroesid, S.E.,M.M. (2016). *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa, (2018). Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

- Lincoln Arsyad. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Prasetyo, Ratna Azis. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Sosiologi Dialektika, VL:11.
- Qodir, Abdul. (2011). Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi/ penerjemah, Haris Munandar. Ed.5. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa